

Transformasi Sistem Ekonomi Sosial Indonesia 1945-1960: Dari Kekacauan Kolonial Menuju Kemandirian Berbasis Gotong Royong

Nazwa Akhaza Hani ¹, Siti Rahmi ², Rifaldy Yusliandi ³, Reni Ria Armayani Hasibuan ⁴

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia ^{1,2,3,4}

Corresponding Author: nazwaakhazahani@gmail.com^{1*}, harahaprahmi96@gmail.com², rifaldyyusliandi@gmail.com³, reniriaarmayani@uinsu.ac.id⁴

Info Artikel

Submitted: 31 Desember 2025

Revised : 03 Januari 2026

Accepted: 09 Januari 2026

Published: 13 Januari 2026

Keywords: Economic Transformation, Colonial Economy, Mutual Cooperation, Self-Reliant Economy, Indonesian Independence, Guided Democracy

Kata Kunci: Transformasi Ekonomi, Ekonomi Kolonial, Gotong Royong, Ekonomi Berdikari, Kemerdekaan Indonesia, Demokrasi Terpimpin

Abstract

This study analyzes the transformation of Indonesia's socio-economic system from 1945 to 1960 as a crucial phase in building national economic independence amidst the legacy of colonial structures. Using a descriptive qualitative method with a literature study approach, the study examines five phases: the colonial economic legacy, national economic reconstruction (1945-1950), the Liberal Democracy era (1950-1959), the implementation of the principle of mutual cooperation, and the self-reliant economy (1959-1960). The results show that Indonesia inherited a paradoxical condition of being rich in resources but shackled by structural poverty due to the dualism of the colonial economy. Reconstruction efforts faced hyperinflation, chronic budget deficits, and destroyed infrastructure. The nation's founders formulated a third alternative between capitalism and socialism through the mutual cooperation economy institutionalized in Article 33 of the 1945 Constitution. The Liberal Democracy period was marked by the suboptimal Benteng Program, while Guided Democracy emphasized a self-reliant economy through Manipol-USDEK. Despite its strong philosophical idealism, implementation faced technical-managerial obstacles. The study concludes that the period 1945-1960 laid the foundations for Indonesia's economic identity, which emphasized the balance of economic efficiency and social justice, with the relevance of the value of mutual cooperation to Islamic economic principles such as ta'awun and social justice.

Abstrak

Penelitian ini menganalisis transformasi sistem ekonomi sosial Indonesia periode 1945-1960 sebagai fase krusial membangun kemandirian ekonomi nasional di tengah warisan struktur kolonial. Menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi pustaka, penelitian mengkaji lima fase: warisan ekonomi kolonial, rekonstruksi ekonomi nasional (1945-1950), era Demokrasi Liberal (1950-1959), implementasi prinsip gotong royong, dan ekonomi berdikari (1959-1960). Hasil menunjukkan Indonesia mewarisi kondisi paradoks kaya sumber daya namun terbelenggu kemiskinan struktural akibat dualisme ekonomi kolonial. Upaya rekonstruksi menghadapi hiperinflasi, defisit anggaran kronis, dan infrastruktur hancur. Para pendiri bangsa merumuskan alternatif ketiga antara kapitalisme dan sosialisme melalui ekonomi gotong royong yang diinstitutionalisasi dalam Pasal 33 UUD 1945. Periode Demokrasi Liberal ditandai Program Benteng yang belum optimal, sementara Demokrasi Terpimpin menekankan ekonomi berdikari melalui Manipol-USDEK. Meskipun idealisme kuat secara filosofis, implementasi menghadapi kendala teknis-manajerial. Penelitian menyimpulkan periode 1945-1960 meletakkan fondasi identitas ekonomi Indonesia yang

menekankan keseimbangan efisiensi ekonomi dan keadilan sosial, dengan relevansi nilai gotong royong terhadap prinsip ekonomi Islam seperti ta'awun dan keadilan sosial.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Publisher: Lembaga Penerbit Penelitian Nusantara

Pendahuluan

Periode 1945-1960 merupakan fase krusial dalam sejarah perekonomian Indonesia yang ditandai oleh upaya transformasi fundamental dari struktur ekonomi kolonial menuju sistem ekonomi nasional yang berdaulat. Fase ini bukan sekadar transisi kekuasaan politik, melainkan representasi perjuangan ideologis untuk merumuskan identitas ekonomi bangsa yang berakar pada nilai-nilai luhur budaya Indonesia. (Yunita et al., 2017) Ketika proklamasi kemerdekaan dikumandangkan pada 17 Agustus 1945, Indonesia mewarisi kondisi ekonomi yang paradoks: kaya akan sumber daya alam namun terbelenggu dalam kemiskinan struktural akibat eksploitasi sistematis selama lebih dari tiga abad penjajahan. (Gaffar & Parakkasi, 2025)

Kekacauan ekonomi pasca-kemerdekaan menciptakan dilema eksistensial bagi para founding fathers bangsa. Di satu sisi, terdapat kebutuhan mendesak untuk membangun sistem ekonomi yang mampu mensejahterakan rakyat; di sisi lain, keterbatasan modal, infrastruktur yang hancur akibat agresi militer, serta dualisme ekonomi kolonial yang masih mengakar menjadi hambatan struktural yang signifikan. Dalam konteks ini, kondisi hyperinflasi, defisit anggaran yang kronis, dan fragmentasi ekonomi regional yang parah menjadi manifestasi dari krisis multidimensional yang dihadapi Indonesia pada periode awal kemerdekaan. (Hayati et al., 2024)

Menariknya, di tengah kekacauan tersebut, para pemimpin bangsa tidak serta-merta mengadopsi model ekonomi kapitalis Barat atau sosialis Soviet yang tengah mendominasi diskursus global pasca-Perang Dunia II. Sebaliknya, mereka berupaya merumuskan alternatif ketiga yang berakar pada filosofi sosial-ekonomi Indonesia, khususnya prinsip gotong royong yang telah menjadi etos kehidupan masyarakat agraris Nusantara sejak berabad-abad lampau. Konsep ekonomi gotong royong ini kemudian diinstitusionalisasikan melalui Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengamanatkan perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, dengan penguasaan cabang-cabang produksi penting oleh negara untuk kemakmuran rakyat. (Irfan & Khoirul, 2018)

Periode 1945-1960 juga menandai eksperimen besar-besaran dalam kebijakan ekonomi

Transformasi Sistem Ekonomi Sosial Indonesia 1945-1960: Dari Kekacauan Kolonial Menuju Kemandirian Berbasis Gotong Royong

Nazwa Akhaza Hani¹, Siti Rahmi², Rifaldy Yusliandi³, Reni Ria Armayani Hasibuan⁴

Indonesia. Dari sistem ekonomi liberal periode kabinet parlementer (1950-1957) yang memberikan ruang bagi mekanisme pasar, hingga sistem ekonomi terpimpin (1959-1965) yang menekankan peran sentral negara dalam perencanaan ekonomi, Indonesia mengalami dinamika kebijakan yang mencerminkan pergulatan ideologis antara berbagai kelompok politik. Nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda pada 1957-1958, pembentukan Dewan Perancang Nasional (Depernas) pada 1959, serta peluncuran berbagai program pembangunan nasional seperti Rencana Pembangunan Lima Tahun (1956-1960) merupakan manifestasi konkret dari upaya mencari jati diri ekonomi nasional. (Humairo & Afianto, 2023)

Namun demikian, narasi transformasi ekonomi Indonesia periode ini seringkali disederhanakan dalam historiografi ekonomi sebagai periode kegagalan dan ketidakstabilan semata. Padahal, jika dikaji secara mendalam dengan perspektif ekonomi kelembagaan dan sejarah ekonomi komparatif, periode ini justru meletakkan fondasi bagi sistem ekonomi sosial Indonesia yang unik sebuah sistem yang berupaya menyeimbangkan efisiensi ekonomi dengan keadilan sosial, pertumbuhan dengan pemerataan, serta modernisasi dengan preservasi nilai-nilai kultural. (Rabani, 2020) Kegagalan untuk memahami kompleksitas periode ini dapat mengakibatkan bias interpretatif yang mereduksi perjuangan ekonomi bangsa menjadi sekadar kegagalan teknis, tanpa menangkap dimensi filosofis dan perjuangan ideologis yang terkandung di dalamnya.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif proses transformasi sistem ekonomi sosial Indonesia pada periode 1945-1960 dengan fokus pada tiga pertanyaan penelitian utama: pertama, bagaimana warisan struktural ekonomi kolonial membentuk kondisi awal perekonomian Indonesia pasca-kemerdekaan?; kedua, bagaimana para pemimpin bangsa merumuskan dan mengimplementasikan konsep ekonomi gotong royong sebagai alternatif terhadap kapitalisme dan sosialisme?; dan ketiga, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan transformasi ekonomi pada periode tersebut? Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemahaman yang lebih mendalam tentang akar historis sistem ekonomi Indonesia kontemporer serta relevansinya bagi upaya pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Signifikansi penelitian ini terletak pada urgensinya dalam konteks diskursus ekonomi Islam kontemporer. Prinsip gotong royong yang menjadi basis filosofis ekonomi Indonesia memiliki resonansi kuat dengan nilai-nilai ekonomi Islam seperti ta'awun (tolong-menolong), takaful (solidaritas sosial), dan adalah *ijtima'iyah* (keadilan sosial). Dalam era di mana Indonesia berupaya

memperkuat identitas ekonomi syariah sebagai bagian integral dari sistem ekonomi nasional, pemahaman historis tentang bagaimana nilai-nilai kolektif dan keadilan sosial pernah diupayakan untuk diintegrasikan ke dalam kebijakan ekonomi nasional menjadi sangat relevan. Penelitian ini juga berkontribusi pada literatur ekonomi pembangunan dengan menyajikan studi kasus historis tentang bagaimana negara pascakolonial berupaya membangun kemandirian ekonomi di tengah tekanan geopolitik Perang Dingin dan keterbatasan struktural yang diwariskan oleh kolonialisme.

Tinjauan Pustaka

1. Warisan Ekonomi Kolonial dan Dinamika Rekonstruksi Awal Kemerdekaan

Sejumlah penelitian menegaskan bahwa kondisi ekonomi Indonesia pasca-kemerdekaan sangat dipengaruhi oleh warisan struktur kolonial yang bersifat dualistik dan eksploitatif. Aditya et al. (2024) menunjukkan bahwa kolonialisme membentuk ketergantungan ekonomi melalui penguasaan sektor-sektor strategis oleh modal asing, sehingga masyarakat pribumi terjebak dalam kemiskinan struktural. Temuan ini sejalan dengan Hayati et al. (2024) dan Umah et al. (2024) yang mengungkap bahwa periode 1945–1950 ditandai oleh kekacauan ekonomi akibat perang, inflasi tinggi, lemahnya institusi fiskal, serta keterbatasan kapasitas negara dalam mengelola perekonomian nasional.

Dalam konteks tersebut, kebijakan rekonstruksi ekonomi awal seperti penerbitan ORI, program pinjaman nasional, dan rasionalisasi angkatan perang dipandang sebagai respons darurat negara terhadap krisis multidimensional. Namun, Gaffar dan Parakkasi (2025) menilai bahwa kebijakan-kebijakan tersebut belum mampu mengubah struktur ekonomi kolonial secara fundamental karena masih kuatnya ketergantungan pada sektor primer dan minimnya basis industri nasional. Literatur ini menegaskan bahwa fase awal kemerdekaan merupakan periode transisi penting yang meletakkan fondasi ekonomi nasional, meskipun belum menghasilkan transformasi struktural yang signifikan.

2. Gotong Royong dan Pencarian Jati Diri Sistem Ekonomi Nasional

Kajian mengenai pemikiran ekonomi Indonesia pada era Demokrasi Liberal dan Demokrasi Terpimpin menyoroti upaya negara mencari sistem ekonomi yang sesuai dengan kepribadian bangsa. Humairo dan Afiyanto (2023) serta Rakhman dan Hidayat (2022) menunjukkan bahwa ketidakstabilan politik pada era Demokrasi Liberal berdampak pada inkonsistensi kebijakan ekonomi, termasuk kegagalan Program Benteng dalam memperkuat pengusaha pribumi. Kondisi ini mendorong munculnya pendekatan alternatif yang menekankan peran negara dan kolektivitas dalam pembangunan ekonomi.

Transformasi Sistem Ekonomi Sosial Indonesia 1945-1960: Dari Kekacauan Kolonial Menuju Kemandirian Berbasis Gotong Royong

Nazwa Akhaza Hani¹, Siti Rahmi², Rifaldy Yusliandi³, Reni Ria Armayani Hasibuan⁴

Konsep gotong royong kemudian diposisikan sebagai basis filosofis sistem ekonomi nasional dan diinstitutionalisasi melalui Pasal 33 UUD 1945. Rabani (2020) menilai bahwa prinsip ini mencerminkan upaya menyeimbangkan efisiensi ekonomi dan keadilan sosial dalam konteks negara pascakolonial. Sementara itu, Irpan dan Khoirul (2018) menekankan kesesuaian nilai gotong royong dengan prinsip ekonomi Islam seperti ta'awun dan keadilan sosial. Meskipun idealisme ekonomi berdikari pada akhir 1950-an menghadapi kendala teknis dan manajerial, literatur sepakat bahwa periode ini merupakan fase penting dalam pembentukan identitas ekonomi Indonesia yang berorientasi pada kemandirian dan kesejahteraan Bersama.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif historis. Metode kualitatif dipilih karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan fenomena transformasi sistem ekonomi sosial Indonesia periode 1945-1960 secara holistik-kontekstual dengan mengumpulkan data dari sumber-sumber alamiah dan memanfaatkan peneliti sebagai instrumen kunci. (Fadli, 2021) Pendekatan deskriptif historis digunakan untuk mendeskripsikan dan menganalisis secara kritis peristiwa masa lalu serta menghasilkan narasi dan penafsiran yang tepat mengenai dinamika ekonomi Indonesia pasca-kemerdekaan. (Rijali, 2018)

Jenis penelitian ini adalah studi pustaka (library research), di mana pengumpulan data dilakukan dengan cara mencari sumber dan merekonstruksi informasi dari berbagai literatur seperti buku, jurnal ilmiah, dokumen sejarah, arsip kebijakan ekonomi, dan riset-riset terdahulu yang relevan dengan topik penelitian. (Sari, 2020) Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari jurnal nasional dan internasional, buku referensi sejarah ekonomi Indonesia, dokumen kebijakan pemerintah periode 1945-1960, serta artikel ilmiah yang membahas sistem ekonomi Indonesia pada era awal kemerdekaan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan menganalisis berbagai literatur yang berkaitan dengan transformasi sistem ekonomi Indonesia periode 1945-1960. Proses pengumpulan data mengikuti empat tahap studi pustaka yaitu menyiapkan perlengkapan alat yang diperlukan, menyiapkan bibliografi kerja, mengorganisasikan waktu, dan membaca serta mencatat bahan penelitian. Data yang terkumpul kemudian ditelaah secara mendalam untuk mengidentifikasi pola, tema, dan hubungan kausal antara kebijakan ekonomi dengan kondisi sosial-politik pada periode tersebut. (Hadi & Afandi, 2021)

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan teknik analisis konten (content analysis). Proses analisis mengikuti model Miles dan Huberman yang terdiri dari tiga tahap: reduksi data, penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi data, peneliti merangkum dan memilih hal-hal pokok yang berkaitan dengan transformasi sistem ekonomi, kebijakan gotong royong, dan kondisi ekonomi kolonial. Tahap penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif yang sistematis untuk memudahkan pemahaman tentang dinamika yang terjadi. Terakhir, tahap penarikan kesimpulan dilakukan dengan menginterpretasikan data secara induktif untuk menghasilkan pemahaman mendalam tentang proses transformasi ekonomi Indonesia periode 1945-1960.

Hasil dan Pembahasan

Transformasi sistem ekonomi sosial Indonesia periode 1945-1960 merupakan proses kompleks yang melibatkan upaya gigih para pendiri bangsa untuk melepaskan diri dari belenggu struktur ekonomi kolonial dan membangun fondasi ekonomi nasional yang berkeadilan. Periode ini tidak dapat dipahami sebagai rentang waktu yang monolitik, melainkan sebagai fase-fase yang dinamis dimana berbagai eksperimen kebijakan ekonomi dijalankan dengan tujuan mewujudkan cita-cita kemakmuran bersama yang tercantum dalam konstitusi. Untuk memahami kompleksitas transformasi ini secara menyeluruh, pembahasan akan diuraikan ke dalam lima sub-bahasan yang saling terkait dan membentuk narasi historis yang koheren tentang perjuangan ekonomi Indonesia pada periode awal kemerdekaan.

1. Warisan Sistem Ekonomi Kolonial dan Kekacauan Awal Kemerdekaan

Struktur ekonomi yang diwariskan oleh kolonialisme Belanda kepada Indonesia merdeka merupakan sistem yang dirancang untuk kepentingan eksploitasi dan akumulasi kapital bagi negara penjajah, bukan untuk kesejahteraan penduduk pribumi. Sistem ekonomi kolonial yang diterapkan sejak masa VOC hingga pemerintahan Hindia Belanda telah menciptakan dualisme ekonomi yang mendalam, dimana ekonomi modern yang kapitalistik berdampingan dengan ekonomi tradisional agraris yang terbelakang. (Aditya et al., 2024) Kebijakan ekonomi kolonial seperti sistem tanam paksa (cultuurstelsel) yang diberlakukan sejak 1830, telah mengubah pola produksi dan struktur tenaga kerja masyarakat Indonesia secara fundamental, menyebabkan eksploitasi masif terhadap sumber daya alam dan tenaga kerja pribumi yang berujung pada kemiskinan struktural.

Warisan struktural ekonomi kolonial ini menciptakan ketergantungan ekonomi yang sistematis,

dimana Indonesia hanya berfungsi sebagai penyedia bahan mentah (raw materials) untuk industri di negeri Belanda dan Eropa, sementara produk manufaktur harus diimpor dengan harga tinggi. (Nurmalasyari et al., 2024) Sektor-sektor ekonomi strategis seperti pertambangan, transportasi, perkebunan, perkapalan, perbankan, hingga industri hiburan dikuasai sepenuhnya oleh modal asing, khususnya Belanda, yang menciptakan struktur ekonomi ekstraktif yang memperkaya kolonial sambil memiskinkan rakyat pribumi. Kondisi ini diperparah dengan adanya sistem monopoli perdagangan yang ketat dan pembatasan akses penduduk pribumi terhadap modal, teknologi, dan pendidikan yang diperlukan untuk berkembang secara ekonomi.

Ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, negara muda ini mewarisi kondisi ekonomi yang sangat memprihatinkan. Perang kemerdekaan selama empat tahun (1945-1949) telah menguras kas negara yang memang sudah kosong, mengeluarkan banyak biaya untuk operasi militer, padahal negara belum memiliki sumber pendapatan yang memadai. (Umah et al., 2024) Infrastruktur ekonomi mengalami kehancuran akibat agresi militer Belanda dan perang gerilya yang berkepanjangan. Blokade ekonomi yang dilancarkan Belanda sejak November 1945 memperparah situasi dengan menghambat kegiatan ekspor barang-barang Indonesia, menyebabkan defisit neraca perdagangan yang sangat besar dan kelangkaan devisa negara. Inflasi merajalela karena pemerintah terpaksa mencetak uang untuk membiayai perjuangan kemerdekaan, sementara produksi berbagai sektor ekonomi terus merosot drastis.

Kondisi sosial-ekonomi masyarakat pada periode ini sangat memprihatinkan. Selama pendudukan Jepang (1942-1945), rakyat Indonesia telah mengalami penderitaan luar biasa akibat kebijakan eksploitasi sumber daya untuk keperluan perang Pasifik, yang menyebabkan bencana kelaparan dan mewabahnya berbagai penyakit. Sistem pemerintahan dan administrasi ekonomi belum tertata dengan baik karena Indonesia sebagai negara baru belum memiliki aparatur dan sistem yang mapan untuk mengelola perekonomian nasional. Lebih dari itu, hasil Konferensi Meja Bundar (KMB) tahun 1949 yang seharusnya menjadi solusi justru membawa beban baru berupa kewajiban melunasi utang Hindia Belanda kepada negara induk Belanda sebesar 4,5 miliar gulden, yang semakin memberatkan kondisi fiskal negara.

2. Upaya Rekonstruksi Ekonomi Nasional (1945–1950)

Menghadapi kondisi ekonomi yang kacau balau, pemerintah Indonesia pada periode awal kemerdekaan melakukan berbagai upaya rekonstruksi ekonomi nasional meskipun dalam keterbatasan yang luar biasa. Langkah pertama yang diambil adalah pembentukan kelembagaan

Transformasi Sistem Ekonomi Sosial Indonesia 1945-1960: Dari Kekacauan Kolonial Menuju Kemandirian Berbasis Gotong Royong

Nazwa Akhaza Hani¹, Siti Rahmi², Rifaldy Yusliandi³, Reni Ria Armayani Hasibuan⁴

ekonomi nasional untuk menggantikan institusi-institusi kolonial yang masih bercokol. Pada 19 Januari 1947, pemerintah membentuk Badan Perancang Ekonomi (BPE) yang dipimpin oleh Menteri Persediaan Makanan Rakyat, I.J. Kasimo, dengan tugas memberikan rekomendasi dan saran terkait kebijakan pemerintah dalam mengelola dan membangun ekonomi Indonesia. Di bawah kepemimpinan Kasimo, BPE menghasilkan Rencana Lima Tahunan yang dikenal dengan nama Kasimo Plan yang bertujuan untuk mengembangkan industri pangan Indonesia melalui intensifikasi pertanian, ekstensifikasi pertanian dengan membuka lahan-lahan baru, serta program transmigrasi untuk memindahkan penduduk dari Jawa yang padat ke pulau-pulau luar Jawa.

Kebijakan moneter juga menjadi prioritas utama untuk mengatasi inflasi dan membangun sistem keuangan nasional yang independen. Pada bulan Juli 1946, pemerintah meluncurkan Program Pinjaman Nasional yang dipimpin oleh Menteri Keuangan Ir. Surachman dengan persetujuan BP-KNIP, yang bertujuan untuk mengisi anggaran negara dan menjadi modal pemerintah untuk membangun sarana dan prasarana serta mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan nasional. Langkah lebih berani diambil pada Oktober 1946 ketika pemerintah mengeluarkan Oeang Republik Indonesia (ORI) sebagai alat pembayaran yang sah dan melarang peredaran uang NICA (Netherlands Indies Civil Administration) yang masih beredar luas di wilayah Indonesia. Kebijakan ini memiliki dimensi politik yang kuat sebagai simbol kedaulatan ekonomi Indonesia di tengah upaya Belanda untuk kembali menguasai Indonesia.

Program Rekonstruksi dan Rasionalisasi Angkatan Perang (Rera) yang diluncurkan tahun 1948 merupakan upaya inovatif untuk mengalihkan tenaga bekas angkatan perang ke bidang-bidang produktif, sekaligus mengurangi beban anggaran negara yang terlalu besar untuk membiayai militer. Kebijakan ini mencerminkan kesadaran pemerintah bahwa pembangunan ekonomi memerlukan transformasi dari ekonomi perang menjadi ekonomi pembangunan yang produktif. Pada tahun 1950, Menteri Keuangan Syafruddin Prawiranegara menggagas kebijakan yang dikenal dengan "Gunting Syafruddin" yang disahkan melalui SK Menteri Keuangan Nomor 1 tanggal 19 Maret 1950, yang bertujuan untuk memotong nilai uang yang beredar dan mengurangi defisit anggaran yang telah mencapai Rp 5,1 miliar. (Devi Ellok, 2018) Meskipun kontroversial, kebijakan ini berhasil mengurangi jumlah uang beredar dan menekan laju inflasi dalam jangka pendek.

Upaya rekonstruksi ekonomi periode ini juga mencakup usaha untuk membangun basis industri nasional dan memberdayakan pengusaha pribumi. Pemerintah menyadari bahwa tanpa adanya kelas pengusaha nasional yang kuat, Indonesia akan terus bergantung pada modal dan pengusaha asing.

Namun, upaya-upaya ini menghadapi berbagai kendala struktural yang berat, mulai dari keterbatasan modal, minimnya tenaga ahli dan manajer yang kompeten, hingga infrastruktur yang rusak parah akibat perang. Meskipun demikian, periode ini meletakkan fondasi penting bagi upaya pembangunan ekonomi nasional di masa-masa berikutnya dan menunjukkan komitmen kuat para pemimpin bangsa untuk membangun kemandirian ekonomi.

3. Transformasi Sistem Ekonomi Sosial Era Demokrasi Liberal (1950–1959)

Periode Demokrasi Liberal (1950-1959) menandai fase eksperimen besar-besaran dalam kebijakan ekonomi Indonesia, dimana pemerintah berupaya mencari formula yang tepat antara mekanisme pasar dan intervensi negara dalam pembangunan ekonomi nasional. Pada periode ini, sistem pemerintahan parlementer menghasilkan pergantian kabinet yang sangat sering—tercatat terdapat tujuh kabinet dalam kurun waktu sembilan tahun—yang mengakibatkan ketidakstabilan dalam implementasi kebijakan ekonomi jangka panjang. Setiap kabinet datang dengan program ekonomi yang berbeda-beda, meskipun tujuan fundamentalnya sama yaitu mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional yang berdaulat.

Salah satu program paling ambisius pada periode ini adalah Program Benteng yang digagas oleh Sumitro Djojohadikusumo dalam Kabinet Natsir pada April 1950. Program ini bertujuan memberikan kesempatan kepada pengusaha pribumi untuk mengembangkan usahanya melalui pemberian kredit dengan bunga rendah dan akses istimewa terhadap lisensi impor. Dalam kurun waktu tiga tahun (1950-1953), lebih kurang 700 perusahaan milik bangsa Indonesia menerima bantuan kredit dari program ini. Namun, Program Benteng tidak dapat berjalan dengan baik karena berbagai faktor, termasuk belum adanya kesiapan mental dan kapabilitas manajerial dari pengusaha pribumi yang menerima bantuan, serta masih kuatnya dominasi jaringan bisnis asing yang telah mapan sejak era kolonial.

Kebijakan ekonomi periode Demokrasi Liberal juga ditandai dengan upaya menarik investasi asing dan meliberalisasi perdagangan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Beberapa kabinet membuka pintu lebar-lebar bagi modal asing dengan harapan dapat mempercepat pembangunan infrastruktur dan industri. Namun, kebijakan ini mendapat tentangan keras dari kelompok nasionalis yang menganggapnya sebagai bentuk neokolonialisme yang akan menjebak Indonesia dalam ketergantungan ekonomi baru terhadap negara-negara kapitalis. Kontradiksi antara kebutuhan pragmatis akan modal dan teknologi asing dengan komitmen ideologis untuk membangun ekonomi nasional yang mandiri menjadi dilema konstan dalam kebijakan ekonomi periode ini.

Kondisi ekonomi Indonesia pada periode Demokrasi Liberal ditandai dengan pertumbuhan yang tidak stabil dan ketimpangan yang semakin melebar. Di satu sisi, sektor ekspor komoditas primer seperti karet, minyak, dan hasil perkebunan lainnya mengalami pertumbuhan yang cukup baik karena permintaan pasar dunia yang tinggi pada awal 1950-an. Namun, di sisi lain, sektor manufaktur domestik tetap lemah karena tidak mampu bersaing dengan produk impor yang membanjiri pasar dalam negeri. Inflasi tetap menjadi masalah kronis, defisit anggaran terus membengkak, dan kesenjangan ekonomi antara kelompok elit yang menguasai perdagangan dan perkebunan dengan massa rakyat yang masih hidup dalam ekonomi subsisten semakin menganga lebar. Ketidakpuasan terhadap kinerja ekonomi Demokrasi Liberal ini akhirnya menjadi salah satu faktor yang mendorong Presiden Soekarno untuk mengambil langkah radikal melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang mengakhiri era Demokrasi Liberal dan membuka era Demokrasi Terpimpin.

4. Gotong Royong sebagai Basis Kemandirian Ekonomi Nasional

Konsep gotong royong sebagai basis filosofis sistem ekonomi Indonesia bukan semata-mata konstruksi ideologis yang artifisial, melainkan berakar pada praktik sosial-ekonomi masyarakat agraris Nusantara yang telah berlangsung berabad-abad. Presiden Soekarno secara konsisten menekankan bahwa Indonesia harus merumuskan sistem ekonomi yang sesuai dengan kepribadian bangsa, yang berbeda dengan kapitalisme liberal maupun sosialisme Marxis, dan menemukan jawabannya dalam nilai gotong royong yang telah menjadi etos kehidupan masyarakat Indonesia. (Rakhman & Hidayat, 2022) Gotong royong dalam konteks ekonomi nasional dipahami sebagai sistem kerjasama kolektif dimana kepentingan bersama ditetapkan bersama, usaha dilaksanakan secara bersama-sama, dan dipimpin oleh pemimpin yang dimufakati bersama untuk mencapai kemakmuran yang adil dan merata.

Institusionalisasi nilai gotong royong dalam sistem ekonomi nasional tertuang dalam Pasal 33 UUD 1945 yang menjadi landasan konstitusional bagi ekonomi Indonesia. Pasal ini mengamanatkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, dengan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, serta kekayaan alam digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Formulasi ini mencerminkan upaya untuk menyeimbangkan peran negara, swasta, dan koperasi dalam aktivitas ekonomi, dengan menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan utama, bukan akumulasi kapital atau pertumbuhan ekonomi semata.

Transformasi Sistem Ekonomi Sosial Indonesia 1945-1960: Dari Kekacauan Kolonial Menuju Kemandirian Berbasis Gotong Royong

Nazwa Akhaza Hani¹, Siti Rahmi², Rifaldy Yusliandi³, Reni Ria Armayani Hasibuan⁴

Pada era Demokrasi Terpimpin (1959-1965), konsep gotong royong mendapat penekanan yang lebih kuat dalam kebijakan ekonomi melalui sistem Ekonomi Terpimpin. Ekonomi Terpimpin menghendaki kegotong-royongan di bidang ekonomi, dimana menurut Soekarno sistem ekonomi ini mengandung tiga unsur yakni kepentingan bersama yang ditetapkan bersama, usaha bersama yang dilaksanakan bersama, dan pemimpin bersama yang dimufakati bersama. Sosialisme Indonesia yang diusung Soekarno adalah gotong royong berdasarkan Pancasila, yang menekankan bahwa bangsa Indonesia yang kaya akan sumber daya alam harus mampu memanfaatkannya secara optimal untuk kesejahteraan bersama melalui kerja sama kolektif antara rakyat dan pemimpin.

Manifestasi konkret dari prinsip gotong royong dalam kelembagaan politik-ekonomi terlihat dari pembentukan DPR Gotong Royong (DPR-GR) pada tahun 1960 setelah Presiden Soekarno membubarkan DPR hasil pemilu 1955. Anggota DPR-GR ditunjuk berdasarkan perimbangan lima golongan yaitu Nasionalis, Islam, Komunis, Kristen-Katolik, dan golongan fungsional (karya), yang dimaksudkan untuk mencerminkan keseluruhan kekuatan sosial dalam masyarakat Indonesia. Meskipun dari perspektif demokrasi liberal pembentukan DPR-GR ini problematis karena menghilangkan mekanisme pemilihan langsung, namun dari perspektif ideologi gotong royong ini dipandang sebagai upaya untuk membangun sistem perwakilan yang lebih inklusif dan mencerminkan semangat musyawarah mufakat.

5. Menuju Ekonomi Berdikari (1959–1960)

Periode 1959-1960 menandai titik kulminasi dari upaya Indonesia untuk membangun kemandirian ekonomi nasional melalui konsep ekonomi berdikari (berdiri di atas kaki sendiri). Dekrit Presiden 5 Juli 1959 tidak hanya mengakhiri era Demokrasi Liberal dan kembali ke UUD 1945, tetapi juga menandai perubahan fundamental dalam orientasi kebijakan ekonomi Indonesia dari sistem yang relatif terbuka terhadap mekanisme pasar dan modal asing menuju sistem yang lebih tertutup dan nasionalistik. Soekarno berpikir bahwa Indonesia dengan kekayaan sumber daya alamnya harus mampu membangun ekonomi sendiri bersama-sama rakyat dan pemimpinnya, tanpa bergantung pada bantuan atau utang dari negara-negara kapitalis Barat yang dianggap membawa agenda neokolonialisme.

Pada bulan Juli 1959, Soekarno menyampaikan pidato kenegaraan berjudul "Penemuan Kembali Revolusi Kita" yang menguraikan ideologi Demokrasi Terpimpin mencakup revolusi, gotong royong, demokrasi, anti-imperialisme, anti-kapitalisme, anti-demokrasi liberal, dan perubahan secara total. Pidato ini kemudian ditetapkan oleh Dewan Pertimbangan Agung

Transformasi Sistem Ekonomi Sosial Indonesia 1945-1960: Dari Kekacauan Kolonial Menuju Kemandirian Berbasis Gotong Royong

Nazwa Akhaza Hani¹, Siti Rahmi², Rifaldy Yusliandi³, Reni Ria Armayani Hasibuan⁴

Sementara (DPAS) sebagai Garis-garis Besar Haluan Negara dengan nama Manifesto Politik Republik Indonesia (Manipol). Manipol kemudian dijabarkan lebih lanjut menjadi USDEK yang merupakan akronim dari UUD 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia. Sejak saat itu, seluruh gerak dan langkah komponen bangsa Indonesia diarahkan untuk melaksanakan Manipol-USDEK.

Dalam bidang ekonomi, konsep berdikari diwujudkan melalui pembentukan Dewan Perancang Nasional (Depernas) pada tahun 1959 yang bertugas merumuskan Rencana Pembangunan Nasional Semesta Berencana (RPNSB). RPNSB dirancang sebagai program pembangunan ekonomi jangka panjang dengan fokus pada industrialisasi, swasembada pangan, dan pengurangan ketergantungan pada impor. Bank Industri Negara dibentuk dengan fokus khusus mengembangkan sektor industri nasional. Program-program ini mencerminkan orientasi ekonomi yang lebih dirigis (diarahkan negara) dengan perencanaan terpusat, yang dalam beberapa aspek mirip dengan model ekonomi sosialis, meskipun Soekarno selalu menegaskan bahwa sosialisme Indonesia berbeda dengan sosialisme Marxis karena berakar pada nilai-nilai Pancasila dan gotong royong.

Namun, implementasi ekonomi berdikari menghadapi berbagai kendala serius. Rangkaian kebijakan yang diluncurkan tidak mencapai hasil yang diharapkan, bahkan Indonesia justru mengalami kemunduran dalam berbagai sektor ekonomi. Inflasi terus meningkat dan mencapai tingkat yang sangat tinggi, situasi politik yang semakin tegang dengan meningkatnya pengaruh PKI, serta konflik dengan negara-negara Barat khususnya terkait dengan kampanye pembebasan Irian Barat, semakin memperburuk kondisi ekonomi Indonesia. Meskipun secara ideologis konsep ekonomi berdikari sangat menarik dan mencerminkan aspirasi kuat untuk kemandirian nasional, namun dalam praktiknya periode ini menunjukkan bahwa idealisme tanpa didukung oleh kapasitas teknis, modal, dan manajemen yang memadai akan menghasilkan hasil yang mengecewakan. Warisan periode ini adalah pengalaman berharga tentang pentingnya keseimbangan antara idealisme kemandirian ekonomi dengan pragmatisme dalam pengelolaan ekonomi modern.

KESIMPULAN

Transformasi sistem ekonomi sosial Indonesia periode 1945-1960 merupakan fase krusial dalam upaya membangun kemandirian ekonomi nasional di tengah warisan struktur kolonial yang eksploitatif. Indonesia mewarisi sistem ekonomi kolonial yang menciptakan dualisme ekonomi mendalam dan kemiskinan struktural, dengan kondisi paradoks: kaya sumber daya alam namun

Transformasi Sistem Ekonomi Sosial Indonesia 1945-1960: Dari Kekacauan Kolonial Menuju Kemandirian Berbasis Gotong Royong

Nazwa Akhaza Hani¹, Siti Rahmi², Rifaldy Yusliandi³, Reni Ria Armayani Hasibuan⁴

miskin secara struktural, infrastruktur hancur, inflasi merajalela, dan ketergantungan tinggi pada modal asing. Upaya rekonstruksi ekonomi nasional periode 1945-1950 menunjukkan komitmen kuat para pendiri bangsa melalui berbagai kebijakan inovatif seperti Kasimo Plan, penerbitan ORI, dan Gunting Syafruddin, meskipun menghadapi keterbatasan sumber daya yang luar biasa. Periode Demokrasi Liberal (1950-1959) ditandai dengan eksperimen kebijakan ekonomi seperti Program Benteng yang menghadapi kegagalan karena ketidaksiapan manajerial dan dominasi jaringan bisnis asing, serta ketidakstabilan politik dengan pergantian kabinet yang sering mengakibatkan inkonsistensi kebijakan ekonomi jangka panjang.

Konsep gotong royong yang diinstitutionalisasi dalam Pasal 33 UUD 1945 mencerminkan upaya merumuskan alternatif ketiga antara kapitalisme dan sosialisme, yang berakar pada nilai-nilai budaya Nusantara dan memiliki resonansi kuat dengan prinsip ekonomi Islam seperti ta'awun dan keadilan sosial. Periode ekonomi berdikari (1959-1960) menandai puncak aspirasi kemandirian ekonomi melalui Manipol-USDEK dan pembentukan Depernas, namun implementasinya menghadapi kendala serius berupa keterbatasan kapasitas teknis dan manajerial yang menyebabkan memburuknya kondisi ekonomi. Pengalaman ini memberikan pelajaran penting bahwa idealisme kemandirian ekonomi harus didukung oleh pragmatisme dalam pengelolaan ekonomi modern.

Secara keseluruhan, periode 1945-1960 bukan sekadar fase kegagalan ekonomi, melainkan pembelajaran penting dalam pencarian jati diri ekonomi nasional yang meletakkan fondasi sistem ekonomi sosial Indonesia yang unik berupaya menyeimbangkan efisiensi ekonomi dengan keadilan sosial, pertumbuhan dengan pemerataan, serta modernisasi dengan preservasi nilai-nilai kultural. Implikasi penelitian ini sangat relevan bagi konteks ekonomi Indonesia kontemporer, khususnya dalam pengembangan ekonomi syariah yang terintegrasi dengan nilai-nilai gotong royong. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan melakukan kajian lebih mendalam tentang implementasi konkret kebijakan ekonomi gotong royong di tingkat mikro, analisis komparatif dengan negara pascakolonial lainnya, serta eksplorasi relevansi prinsip ekonomi gotong royong dengan konsep ekonomi Islam kontemporer.

DAFTAR PUSTAKA

Aditya, F., Pratama, R. S., Siagian, S. Z., & Grace, V. (2024). Pengaruh Kolonialisme terhadap Struktur Sosial dan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(2), 24402–24407.

Transformasi Sistem Ekonomi Sosial Indonesia 1945-1960: Dari Kekacauan Kolonial Menuju Kemandirian Berbasis Gotong Royong

*Nazwa Akhaza Hani*¹, *Siti Rahmi*², *Rifaldy Yusliandi*³, *Reni Ria Armayani Hasibuan*⁴

- Devi Ellok, W. (2018). REORGANISASI DAN RASIONALISASI ANGKATAN PERANG REPUBLIK INDONESIA DI JAWA TAHUN 1947-1949. *MOZAIK: Sejarah Indonesia*, 3(3), 345–359.
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1>.
- Gaffar, A. A., & Parakkasi, I. (2025). Pemikiran Ekonomi Indonesia pada Masa Penjajahan dan Pasca Kemerdekaan. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 5(1), 1853–1867.
- Hadi, N. F., & Afandi, N. K. (2021). Literature Review is A Part of Research. *Sultra Educational Journal*, 1(3), 64–71. <https://doi.org/10.54297/seduj.v1i3.203>
- Hayati, N., Hasugian, L. E., Jaajah, S., Ribawati, E., Studi, P., Sejarah, P., Sultan, U., & Tirtayasa, A. (2024). SISTEM SOSIAL DAN SISTEM EKONOMI INDONESIA PASCA KEMERDEKAAN. *Sindoro CENDIKIA PENDIDIKAN*, 5(3), 1–10. <https://doi.org/doi.org/10.9644/sindoro.v4i5.3317> SISTEM
- Humairo, I., & Afiyanto, H. (2023). Dinamika ekonomi Tulungagung pasca kemerdekaan Indonesia 1945-1965. *Historiography Journal of Indonesian History and Education*, 3(Oktober), 554–569.
- Irpan, P., & Khoirul, A. (2018). Positivisasi Syariah di Indonesia , Legalisasi atau Birokratisasi ? Positivization of Shariah in Indonesia , Legalization or Bureaucratization ? *Jurnal Konstitusi*, 15(September), 592–615. [https://doi.org/Warisan Ekonomi Kolonial dan Pembentukan Struktur Ekonomi Indonesia Awal Kemerdekaan.](https://doi.org/Warisan%20Ekonomi%20Kolonial%20dan%20Pembentukan%20Struktur%20Ekonomi%20Indonesia%20Awal%20Kemerdekaan)" *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*
- Nurmalasyari, Nadila, W., & Winda Amalia, P. (2024). Transformasi masyarakat indonesia pada masa penjajahan bangsa barat. *SEMAR : Jural Dan Pengabdian Masyarakat*, 2(4), 71–79. <https://doi.org/10.59966/semar.v2i4.1317> TRANSFORMASI
- Rabani, L. O. (2020). Politik dan Ekonomi di Dua Kota : Baubau dan Kendari pada tahun 1950-an – 1960-an (The Politics and Economy in Two Towns : Baubau and Kendari in 1950s-1960s). *Mozaik Humaniora*, 20(1), 39–56. <https://doi.org/10.20473/mozaik.v20i1.15746>
- Rakhman, A. S., & Hidayat, A. (2022). KEBIJAKAN EKONOMI SOEKARNO PADA MASA DEMOKRASI. *Alur Sejarah : Jurnal Pendidikan Sejarah.*, 5(1), 1–10.
- Rijali, A. (2018). Analisis Data Kualitatif Ahmad Rijali UIN Antasari Banjarmasin. *Alhadharah : Jurnal Ilmu Dakwah*, 17(33), 81–95.
- Sari, M. (2020). Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA.

Transformasi Sistem Ekonomi Sosial Indonesia 1945-1960: Dari Kekacauan Kolonial Menuju Kemandirian Berbasis Gotong Royong

*Nazwa Akhaza Hani*¹, *Siti Rahmi*², *Rifaldy Yusliandi*³, *Reni Ria Armayani Hasibuan*⁴

Natural Science : Jurnal Penelitian Bidang IPA Dan Pendidikan IPA, 6(1), 41–53.

Umah, Tubagus Muhamad Damar, I., Lulu, L., & Eko, R. (2024). DINAMIKA SISTEM SOSIAL EKONOMI INDONESIA PASCA KEMERDEKAAN TAHUN 1945-1950. *Sindoro CENDIKIA PENDIDIKAN*, 5(3), 1–10. <https://doi.org/doi.org/10.9644/sindoro.v4i5.3317>

Yunita, M., Noer Azham, A., & Lukytawati, A. (2017). Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia Pengujian Trilemma Conditions pada Perekonomian Indonesia Pengujian Trilemma Conditions pada Perekonomian Indonesia Testing the Trilemma Conditions of Indonesian Economy Pendahuluan. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, 17(2), 151–168. <https://doi.org/10.21002/jepi.v17i2.04>